

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan ialah suatu kejadian fenomena permasalahan global yang dihadapi oleh banyak negara khususnya Negara Indonesia. Dengan memiliki beragam suku, budaya dan wilayah yang luas mengakibatkan kemiskinan menjadi suatu permasalahan sulit untuk terselesaikan di Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemiskinan ini bukan hanya kondisi masalah sosial. Namun, juga mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Sehingga, hal tersebut membuat kemiskinan menjadi topik utama permasalahan yang menjadi suatu pusat perhatian dari pemerintah. Kemiskinan bisa terjadi dikarenakan seseorang tersebut memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi berbagai keperluan hidupnya seperti tempat berlindung, pakaian, makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Kemiskinan mengakibatkan suatu individu tidak dapat dalam mencukupi keperluan dasar kehidupannya dengan baik dikarenakan minimnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan tidak dapat dapat mendapatkan akses pendidikan yang baik. Serta, tidak terdapatnya akses jaminan sosial, perlindungan, kesehatan, dan aspek lainnya untuk kebutuhan seseorang tersebut. Menurut Mulyani (2017) terdapat beberapa penyebab terjadinya kemiskinan yang meliputi menurunnya standart perkembangan pada pendapatan perkapita secara global, tingginya biaya kehidupan, tidak meratanya pembagian subsidi income dari pemerintah, dan tingginya biaya kehidupan. Kemudian, pada kondisi kemiskinan yang tinggi dapat mengakibatkan biaya untuk proses melakukan sebuah pembangunan suatu perekonomian akan bisa menjadi relatif besar. Serta, kondisi

tersebut secara akan tidak langsung dapat memperlambat pembangunan perekonomian dalam berbagai jenis sektor.

Menurut bank dunia, indikator utama kemiskinan yaitu modal yang terbatas dan kepemilikan tanah, terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan, perbedaan dalam peluang diantara anggota para masyarakat, terdapatnya perbedaan dalam kondisi ekonomi dan kualitas manusia, kondisi keproduktifan yang tergolong rendah, buruknya tata kelola pemerintahan. Serta pengolahan potensi alam yang terlalu melampaui batas dan tidak memiliki wawasan terhadap kondisi lingkungan. Pada aspek kemiskinan, terdapat beberapa hak rakyat yang meliputi (1) Hak rakyat agar mempunyai akses untuk keperluan suatu pendidikan; (2) Hak rakyat agar mendapatkan akses untuk keperluan dasar hidupnya yang relatif terjangkau; (3) Hak rakyat agar memiliki keamanan; (4) Hak rakyat mempunyai perlindungan hukum; (5) Hak rakyat agar mendapat profesi yang tergolong layak; (6) Hak rakyat agar bisa berkontribusi untuk menata dan mengatur pemerintahan yang baik; (7) Hak rakyat menunaikan hubungan spiritualnya kepada tuhan; (8) Hak rakyat agar bisa berinovasi; (9) Hak rakyat agar bisa berpartisipasi dalam suatu pengambilan keputusan pemerintahan maupun publik; (10) Hak rakyat agar mempunyai keadilan; (11) Hak rakyat agar mempunyai akses terhadap keperluan kesehatan.

Kemudian, pada permasalahan kemiskinan juga dapat dikatakan menjadi suatu permasalahan yang bertautan dikarenakan bukan hanya memiliki kaitan dengan permasalahan pada rendahnya tingkat konsumsi dan pendapatan, namun juga berkaitan dengan kondisi rendahnya suatu pendidikan, dan ketidakmampuan supaya dapat berkontribusi dalam suatu pembangunan dan berbagai permasalahan yang mempunyai keterkaitan terhadap pembangunan pada sumber daya manusia.

Menurut Arsyad (2010) dalam (Febrianti *et al.*,2022) menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia memiliki sifat multidimensial. Karena timbulnya kemiskinan terdiri dari berbagai aspek pada kehidupan masyarakat, dan tidak hanya berlandaskan pada dasar aspek ekonomi saja. Karena memiliki sifat multidimensial tersebut, membuat kemiskinan bisa diamati berdasarkan berbagai jenis macam aspek yang meliputi aspek sekunder & primer. Pada aspek primer meliputi organisasi sosial dan politik, miskin asset, minimnya ilmu & rendahnya skill. Sebaliknya, pada aspek sekunder meliputi miskin pada keuangan, sumber informasi, dan jaringan sosial.

Pada konteks permasalahan pengentasan kemiskinan di Indonesia, pemerintah sudah melaksanakan berbagai jenis tindakan agar dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan, yakni: 1) UU Nomor 13 Tahun 2011 mengenai penanganan orang fakir miskin; 2) UUD 45, yang mengamanatkan kepada semua jenis warga negara memiliki hak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, terbebas dari keterlantaran dan kemiskinan; 3) Keputusan yang dibuat oleh menteri sosial pada No. 146/HUK/2013 terkait ketentuan pada kriteria dalam mendata orang tidak mampu dan fakir miskin. Akan tetapi, hal ini tersebut masih terdapat kondisi kemiskinan yang cukup tinggi di wilayah Negara Indonesia. Salah satu daerah yang mempunyai kemiskinan dengan kategori cukup tinggi adalah Kabupaten Bojonegoro.

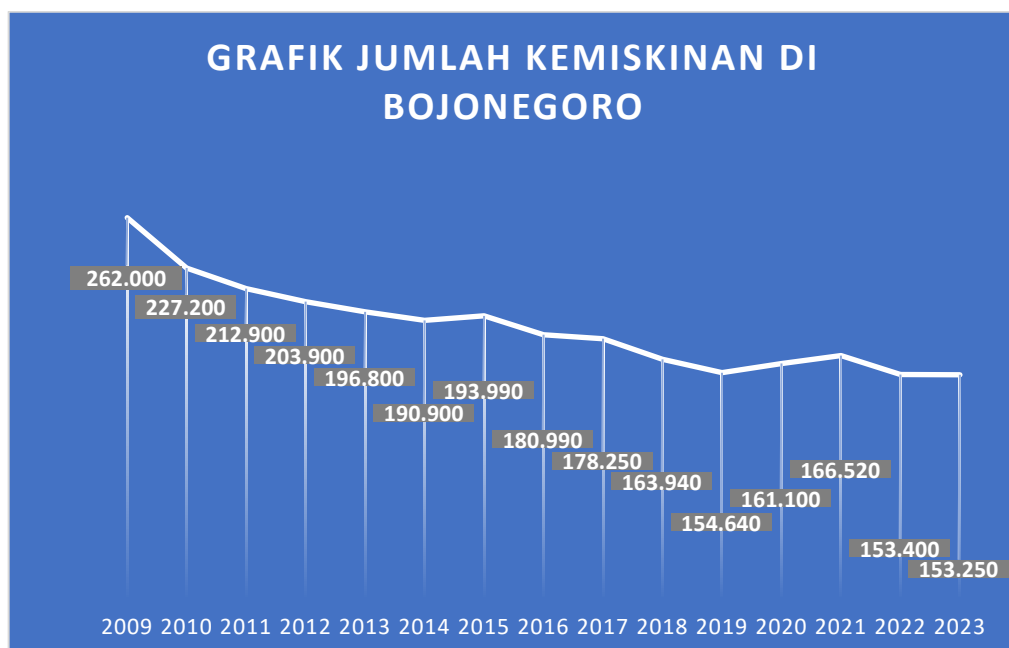
Bojonegoro ialah daerah kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan memiliki jarak wilayah kurang lebih sekitar 110 kilometer dari Kota Surabaya sebagai dari ibukota Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan letak geografis,

pada sisi utara Kabupaten Bojonegoro berbatasan dengan Kabupaten Tuban. Lalu, Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Jombang pada bagian sebelah Selatan. Sedangkan, Kabupaten Blora dan Ngawi pada bagian barat, dan Kabupaten Lamongan pada bagian timur. Bojonegoro mempunyai luas sebesar 230.706 ha, dengan memiliki sebanyak 28 Kecamatan yang meliputi 419 Desa dan 11 Kelurahan. Pada luas tersebut, kondisi dari topografi Bojonegoro kebanyakan mempunyai kondisi tanah yang berbukit dengan memiliki pegunungan jenis kapur yang terdapat di bagian selatan & utara yang mengapit pada dataran rendah yang terdapat di sepanjang aliran sungai bengawan solo dengan memiliki kondisi area tanah yang subur untuk pertanian.

Maka, dengan kondisi geografis tersebut membuat komoditas unggulan di Kabupaten Bojonegoro antara lain adalah sektor bidang pertanian. Pada saat cuaca musim penghujan lahan pertanian para petani menanam tanaman padi. Sedangkan pada saat cuaca di musim kemarau komoditas pertanian para petani menanam tembakau. Sehingga, dengan potensi tersebut membuat Kabupaten Bojonegoro menjadi suatu daerah Kabupaten di Jawa Timur yang termasuk menjadi kabupaten sebagai lumbung pangan nasional & menjadi penghasil tembakau. Lalu, selain pertanian Kabupaten Bojonegoro juga mempunyai potensi yang besar pada sumber daya alam (SDA) berupa minyak & gas. Serta, menjadi salah satu kabupaten yang menjadi penyumbang hasil minyak dan gas di Indonesia. Menurut data Pemkab Bojonegoro (2020) menjelaskan bahwa terdapat sebesar 25 % cadangan minyak nasional yang berada di Kabupaten Bojonegoro.

Besarnya hasil dari gas & minyak di Bojonegoro tersebut tidak hanya berasal dari 1 titik sumber saja, melainkan terdapat beberapa tempat sumber gas & minyak

di Bojonegoro yang meliputi wilayah Kecamatan Ngraho dan Margomulyo, lapangan Kedung Keris dan Banyu Urip yang dikelola oleh Exxon Mobil, lapangan Sukowati yang dioperasikan oleh Pertamina Asset IV, dan lapangan Jambaran-Tiung Biru yang dioperasikan Pertamina EP Cepu. Namun, dengan terdapatnya potensi alam yakni minyak dan gas tersebut semestinya Bojonegoro bisa menaikkan tumbuhnya perekonomian daerah supaya bisa memenuhi berbagai kebutuhan dasar untuk kehidupan masyarakat yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Tetapi, pada kondisi kenyataannya permasalahan kemiskinan masih tetap menjadi masalah utama untuk agar dapat di atasi oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, berikut ini merupakan grafik angka kemiskinan pada tahun 2009-2023 di Kabupaten Bojonegoro.



Gambar 1.1 jumlah kemiskinan tahun 2009-2023

(Sumber : <https://jatim.bps.go.id/>)

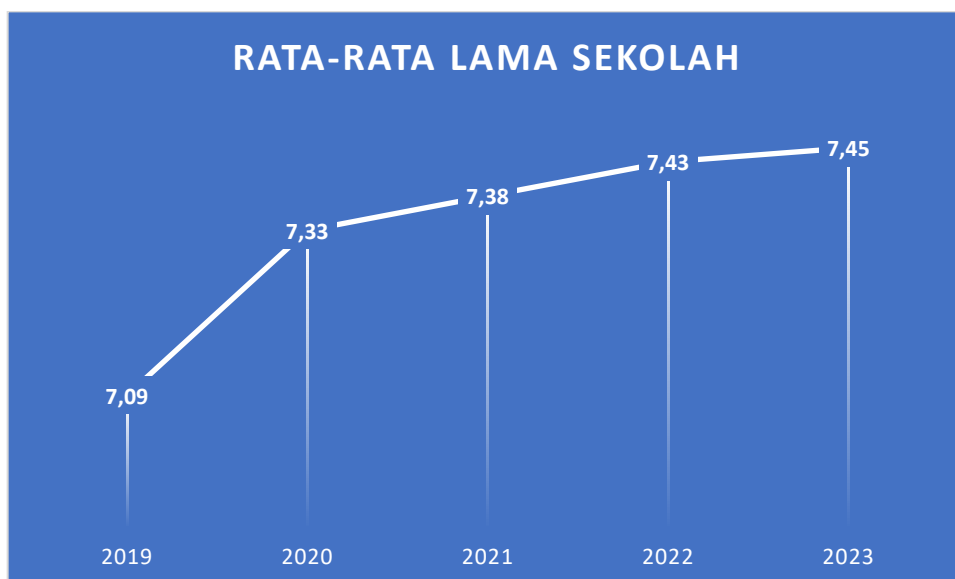
Berlandaskan gambar yang di atas tersebut, dapat dilihat bahwasanya jumlah kemiskinan di Bojonegoro pada tahun 2009-2023 cukup tinggi. Pada tahun 2009, jumlah kemiskinan mencapai 262.000 jiwa. Lalu, dari tahun 2009 angka

kemiskinan di Bojonegoro mengalami penurunan setiap tahunnya hingga tahun 2014 yang menjadi 190.900 jiwa. Akan tetapi mengalami peningkatan menjadi 193.990 pada tahun 2015. Kemudian, dari tahun 2015 tersebut kembali mengalami penurunan hingga menjadi 154.640 jiwa pada tahun 2019. Tetapi, di tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan menjadi 166.520 jiwa. Lalu, setelah tahun 2021 tersebut mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi sebesar 153.250 jiwa. Sehingga, dengan kondisi tersebut membuat Kabupaten Bojonegoro ini memiliki kondisi angka kemiskinan yang cukup tinggi. Maka, hal tersebut memerlukan suatu perhatian dan kefokusannya oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi permasalahan tingginya angka kemiskinan tersebut.

Pendidikan merupakan suatu elemen yang memiliki peranan yang penting untuk bisa meningkatkan kondisi kualitas pada sumber daya manusia. Apabila seseorang mempunyai kualitas pada sumber daya manusia yang tergolong tinggi, maka dapat membuat seseorang tersebut mempunyai pola pikir yang berkualitas dan unggul. Serta, dengan semakin seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka bisa membuat kemampuan dan keterampilan seseorang tersebut menjadi meningkat dan dapat mempercepat berkembangnya produktivitas dalam melakukan pekerjaan. Menurut Arsyad (2010) dalam (Susanto *et al.*, 2019) menjelaskan bahwa pendidikan mempunyai peranan yang penting agar dapat menekan masalah penduduk miskin di semua negara termasuk Negara Indonesia. Peran tersebut dapat dilakukan secara tidak langsung dengan cara memperbaiki tingkat efisiensi dan produktivitas secara umum. Sedangkan, jika secara langsung dapat dilakukan dengan memberikan suatu pelatihan untuk golongan masyarakat miskin terkait keterampilan yang diperlukan dalam menunjang peningkatan produktivitas kehidupan mereka. Sehingga, pada

akhirnya dapat meningkatkan penghasilan mereka. Serta, pendidikan juga menjadi faktor yang penting untuk dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kemiskinan memiliki kaitan yang sangat terdorong besar, sebab pendidikan bisa membagikan suatu kemahiran berupa keterampilan dan penguasaan ilmu untuk dapat dikembangkan.

Pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang asasi untuk semua masyarakat. Hal tersebut dikarenakan, seseorang yang berpendidikan dapat mempunyai suatu kemampuan dalam membebaskan dirinya dari permasalahan kemiskinan. Serta, pendidikan bisa digunakan menjadi suatu indikator dalam melihat kondisi keadaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila semakin tingginya tingkatan pendidikan pada seseorang, maka kondisi tersebut bisa membuat semakin baik pula tingkat kualitas pada sumber daya manusia (SDA) tersebut.



Gambar 1.2 Rata-rata lama sekolah tahun 2019-2023

(Sumber : <https://jatim.bps.go.id/>)

Berdasarkan pada gambar diatas tersebut bahwasanya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bojonegoro di tahun 2019 terjadi kenaikan terus setiap tahunnya hingga tahun 2023. Di tahun 2019, kondisi rata-rata lama sekolah hanya sebanyak 7,09%.

Lalu, meningkat menjadi 7,33 % ditahun 2020 dan mengalami peningkatan menjadi 7,38% pada tahun 2021. Kemudian,di tahun 2022 menjadi sebesar 7,43% dan mengalami peningkatan menjadi 7,45% pada tahun 2023.

Jumlah penduduk ialah jumlah orang yang sedang bertempat tinggal di wilayah suatu negara. Lalu, jumlah penduduk juga dapat diartikan sebagai semua jenis manusia yang bermukim di suatu wilayah dengan jangka waktu selama enam bulan ataupun lebih. Serta, masyarakat yang berdomisili dalam periode waktu tidak lebih dari enam bulan akan tetapi mempunyai niat untuk memilih menetap pada wilayah tersebut. Jumlah penduduk dapat menjadi suatu penyebab yang bisa mengakibatkan kondisi rendah maupun tingginya pada kemiskinan di suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang berjumlah besar bisa menjadi suatu modal dalam pembangunan yang baik jika diikuti dengan kondisi kualitas yang tergolong baik. Namun, jumlah penduduk juga bisa membuat suatu bentuk beban pada pembangunan jika diikuti pada kondisi kualitas yang tergolong buruk. Hal tersebut dikarenakan jika jumlah penduduk yang tergolong besar tersebut tidak terkendali secara baik, Sehingga dapat menjadikan suatu beban dalam pembangunan perekonomian karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Menurut Sukirno (2006) dalam (Heriyanto,2017) menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah penduduk dapat dikatakan sebagai suatu faktor yang menjadi penghambat proses pembangunan dikarenakan apabila perkembangan jumlah penduduk yang tergolong besar. Serta, dengan kondisi tumbuhnya ekonomi yang relatif tinggi dapat mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas dan dapat menimbulkan terjadinya peningkatan pengangguran, sehingga hal tersebut dapat membuat semakin menambah beban pembangunan. Akan tetapi, bertambahnya

jumlah penduduk juga dapat dikatakan sebagai suatu faktor pendorong dikarenakan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan mampu membuat memperluas kondisi pasar. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perluasan barang dan jasa ditentukan oleh pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk.



Gambar 1.3 jumlah penduduk tahun 2019-2023

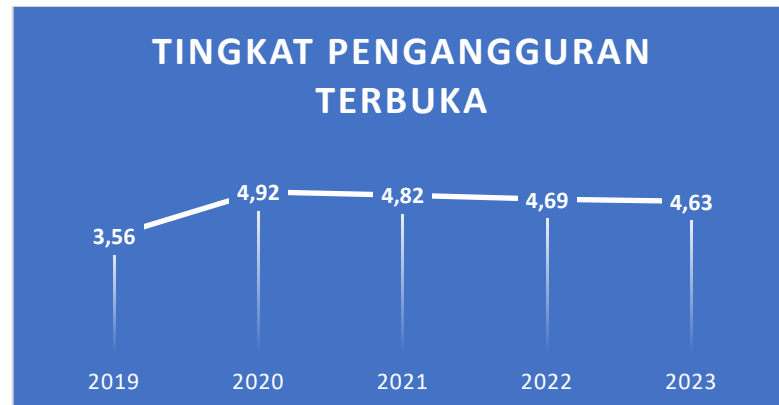
(Sumber : <https://jatim.bps.go.id/>)

Berdasarkan pada gambar diatas tersebut bahwanya jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 hingga 2023 terjadi kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 yang awalnya hanya sebesar 1.249.692 jiwa tersebut mengalami kenaikan terus hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar 1.322.474 jiwa

Pengangguran merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak berkerja, bekerja selama dua hari dalam jangka waktu seminggu . Serta, dapat diartikan juga bahwa seseorang yang sedang melakukan suatu usaha untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Timbulnya pengangguran diakibatkan oleh ketidaksesuaian kondisi permintaan tenaga kerja dan penawaran para tenaga kerja. Permasalahan pengangguran tidak hanya memiliki dampak terhadap aspek sosial saja. Tetapi, juga memiliki keterkaitan terhadap aspek ekonomi. Hal tersebut dikarenakan jika

seseorang sedang mengalami kondisi pengangguran maka seseorang tersebut tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya dan mengalami penurunan standart kehidupan. Serta, dengan tidak terdapatnya penghasilan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kemiskinan. Sehingga, pengangguran mempunyai kaitan yang tergolong erat terhadap kemiskinan.

Salah satu jenis pengangguran yang memiliki permasalahan yang sulit yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan suatu keadaan seseorang yang benar benar tidak mempunyai suatu pekerjaan yang diakibatkan oleh lebih rendahnya jumlah penambahan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu aspek indikator di bidang ketenagakerjaan untuk dapat melihat mengenai dinamika perubahan pengangguran di suatu wilayah. Maka, hal tersebut memiliki peranan yang penting untuk dapat mengetahui dampak yang dihasilkan terhadap perekonomian masyarakat. Pengangguran terbuka berlaku bagi seseorang yang telah sedang aktif untuk berusaha menemukan suatu profesi bagi mereka, sedang mempersiapkan jenis usaha yang akan di jalankan tetapi belum memulai usaha tersebut, dan seseorang yang dengan sengaja tidak sedang mencari suatu pekerjaan dikarenakan merasa tidak memiliki keyakinan untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan tersebut.



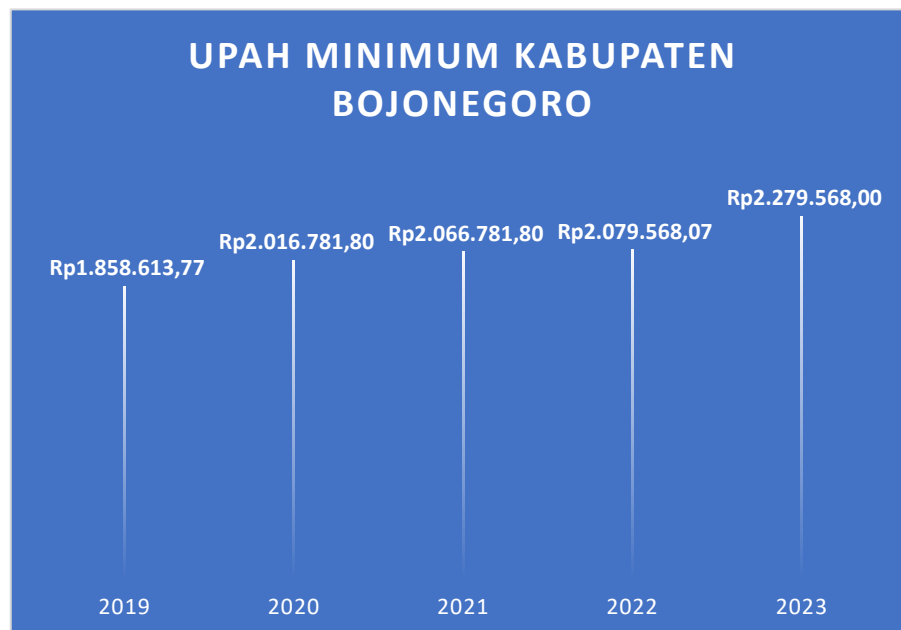
Gambar 1.4 tingkat pengangguran terbuka tahun 2019-2023

(Sumber : <https://jatim.bps.go.id/>)

Berlandaskan pada gambar di atas menunjukkan bahwasanya tingkat pengangguran terbuka di Bojonegoro tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 3,56% dan terjadi peningkatan menjadi 4,92% di tahun 2020. Lalu, pada tahun 2021 terjadi penurunan hingga menjadi sebesar 4,82%. Pada tahun 2022 kembali menurun hingga menjadi 4,69% dan tahun 2023 semakin menurun menjadi 4,63%.

Upah minimum kabupaten merupakan standar acuan minimum gaji setiap bulan yang dikeluarkan oleh pelaku industri / pengusaha untuk diberikan kepada para buruh, pegawai, dan karyawan dalam bisnis yang dijalankan di suatu kabupaten/kota. Maka, para pelaku industri atau pengusaha yang menjalankan usahanya di suatu kabupaten/kota wajib untuk menyesuaikan mengenai upah minimum kabupaten/kota di daerah tersebut. Tujuan yang paling utama dengan diberlakukannya terkait upah minimum yaitu untuk mencukupi kebutuhan dasar kehidupan minimal bagi seseorang yang di antaranya yaitu kesejahteraan pekerja, efisiensi, dan kesehatan. Serta, dengan adanya upah minimum dapat untuk menaikkan martabat seseorang yang mempunyai pendapatan yang tergolong rendah, terutama para tenaga kerja yang miskin.

Upah minimum ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan upah minimum yang tinggi maka diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dengan memiliki upah minimum yang tinggi tersebut dapat membuat masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi dan dapat terbebas dari masalah kemiskinan. Hal tersebut selaras menurut pendapat Todaro & Stephen C (2014) dalam penelitian (Priseptian & Primandhana,2022) yang mengatakan bahwa dibuatnya upah minimum bertujuan untuk menaikkan kesejahteraan para pekerja. Sehingga, dengan demikian bisa untuk mengurangi tingkat kemiskinan.



Gambar 1.5 Upah minimum kabupaten tahun 2019-2023

(Sumber : <https://jatim.bps.go.id/>)

Berlandaskan pada gambar diatas, upah minimum Kabupaten Bojonegoro tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun upah minimum terjadi peningkatan. Di tahun 2019 upah minimum hanya sejumlah Rp 1.858.613,77 rupiah dan terjadi kenaikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 2.279.568,00 rupiah.

Lalu, berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, untuk dapat mengetahui apakah pada variabel bebas diatas tersebut berpengaruh terhadap kemiskinan maka diperlukan suatu penelitian ilmiah untuk mengetahui hasil tersebut. Sehingga, Peneliti tertarik untuk mengetahui dan memahami mengenai permasalahan kemiskinan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti bertujuan untuk menjadikannya pada suatu skripsi dengan berjudul “Pengaruh Pendidikan, Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro ?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro ?
3. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro ?
4. Apakah upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

4. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam menganalisis terkait pengaruh pendidikan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap angka kemiskinan. ruang lingkup pada penelitian ini meliputi variabel terikatnya adalah kemiskinan. Sedangkan, variabel bebasnya yakni pendidikan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum kabupaten Bojonegoro dalam jangka waktu 15 tahun pada periode 2009-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini, peneliti berharap bisa membagikan suatu ilmu pengetahuan dan juga wawasan dalam bidang ekonomi kepada pembaca terkait pengaruh pendidikan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum kabupaten terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

2. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini, peneliti berharap mampu untuk bisa membagikan suatu laporan keterangan agar dapat menjadi bahan masukan dan informasi yang berkaitan dengan masalah kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga, bisa dipergunakan sebagai bahan masukan & juga pertimbangan dalam menentukan sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan terdapatnya penelitian ini, peneliti berharap bisa dijadikan sebagai suatu sumber informasi teruntuk penelitian berikutnya.